

Judul : Kemesraan DPR-Pemerintah Disorot: Pengujung Masa Jabatan 2014-2019
Tanggal : Jumat, 27 September 2019
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 11

► PENGUJUNG MASA JABATAN 2014-2019

Kemesraan DPR-Pemerintah Disorot

Bisnis, JAKARTA — Masyarakat sipil mencemaskan kemesraan pemerintah dan DPR di pengujung masa jabatan 2014—2019 berlanjut pada 5 tahun mendatang, sehingga memperlemah mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi antarkeduanya.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengamati relasi eksekutif-legislatif pasca-Pemilu 2019 semakin mesra. Puncaknya adalah 1 bulan terakhir ketika DPR dan pemerintah seiya-sekata dalam pembentukan UU.

Tatkala kubu oposisi ingin sebagian kursi pimpinan MPR, pemerintah dan koalisinya di parlemen sepakat mengubah UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Imbalannya, kelompok oposisi tidak mengganjal UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dan RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang

kontroversial.

“Dalam sebulan terakhir, DPR dan pemerintah tanpa perbedaan pendapat,” tuturnya dalam acara temu pers di Jakarta, Kamis (26/9).

Lucius menebak kemesraan akhir-akhir ini akan berlanjut ketika DPR periode 2019—2024 resmi dilantik pada 1 Oktober dan Joko Widodo-Ma'ruf Amin membentuk pemerintahan per 20 Oktober.

Bukannya mengontrol pemerintah, kekuatan politik di DPR lebih diuntungkan bila menjajaki kerja sama menyongsong Pemilu 2024.

“Mereka mempersiapkan periode 5 tahun ke depan periode kerja romantis. DPR dan pemerintah akan selalu terperangkap relasi kompromistis untuk kepentingan masing-masing,” tuturnya.

Bila kompromi itu berlanjut, Lucius meyakini pemerintah dan DPR sama-sama tidak berkinerja optimal. Padahal, kedua lembaga tersebut semestinya bisa saling mengawasi dan mengim-

bangi (*checks and balances*) untuk kepentingan rakyat.

Pemerintah, menurut Lucius, hakikatnya dirugikan jika legislatif tidak berkinerja moncer.

Dalam catatan akhir kinerja DPR periode 2014—2019, Formappi menyoroti lemahnya kinerja wakil rakyat menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Per 25 September, Formappi mencatat DPR 2014—2019 mengesahkan 84 UU, terdiri dari 35 UU berasal dari program legislasi nasional (prolegnas) prioritas dan 49 UU sisanya produk legislasi kumulatif terbuka.

Prolegnas prioritas adalah daftar RUU yang direncanakan dengan naskah akademis, sedangkan RUU kumulatif terbuka tidak membutuhkan naskah akademis seperti pengesahan APBN dan ratifikasi perjanjian internasional.

Produk DPR 2014—2019 masih berpotensi bertambah dari 84 UU mengingat legislator berencana menge-

sahkan tiga UU pada rapat paripurna Kamis (26/9). Namun, capaian tersebut tetap kalah dari DPR 2014—2019 yang memproduksi 125 UU.

Di bidang anggaran, Formappi menilai DPR tidak mengkritik utang untuk menambal defisit APBN. Apalagi, defisit terus meningkat dari 2016—2019.

Fungsi pengawasan DPR pun tidak optimal karena temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ihwal potensi kerugian negara di kementerian dan lembaga tidak ditindaklanjuti.

Komisi-komisi di DPR kerap memberikan tanggapan lunak ketika rapat dengan mitra kerja pemerintah yang rapor keuangannya jeblok.

Meski demikian, peneliti Formappi M. Djadijono mengapresiasi langkah DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki persoalan di tubuh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan KPK. Sayangnya, dua hak angket itu tidak mencapai tujuannya. (Samdysara Saragih)